

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada tahun 2015 mendatang, Pemerintah Provinsi Banten akan memasuki tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017, guna mewujudkan Visi **”Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”** yang dilaksanakan melalui 78 (tujuh puluh delapan) program prioritas daerah serta dikelompokkan kedalam 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah digambarkan sebagaimana **Gambar 4.1** sebagai berikut:

Gambar 4.1
Bagan Alir Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah



4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah diperlukan adanya kesinambungan dan keberlanjutan prioritas pembangunan sehingga RKPD Tahun 2015 merupakan suatu rancangan keberlanjutan pada tahun sebelumnya dan memperhatikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD 2012-2017. Adapun tujuan dan sasaran

pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2015 terlihat sebagaimana **Tabel 4.1** sebagai berikut.

Tabel 4.1
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2015

Visi : Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015
Misi Pertama, Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan	Untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	1 Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa;	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	92,15
			Tingkat Kemantapan Jembatan (%)	92
		2 Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)	20.596,26
		3 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Banten;	Rasio Elektrifikasi (%)	87,04
		4 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman	Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan (%)	42,48
			Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar (%)	77,57
		5 Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur;	Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi (%)	70

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015
		6 Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana;	Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar (%)	63,5
			Jumlah hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik (Hari)	360
			Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Industri (%)	17
		7 Meningkatnya fungsi kawasan lindung Banten;	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Banten (%)	29,03
			Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Dampak Banjir (ha)	5.728,745
		8 Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan;	Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)	4,83
		9 Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbarukan diantaranya panas bumi, angin dan surya.	Jumlah Penerapan Energi Alternatif (unit)	345
Misi Kedua, Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat	1 Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;	Indek Gini	0,2
			PDRB Per Kapita (Rp)	26.000.000
			Daya Beli Masyarakat (Rp)	642.341
			Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp)	464.287
			Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Per Bulan (Rp)	513.521
			Pertumbuhan Sektor Pertanian (%)	11
			Pertumbuhan Sektor Peternakan (%)	10
			Pertumbuhan Sektor Perkebunan (tanaman keras) (%)	8,5
			Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%)	8,5

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015
			Pertumbuhan Sektor Pertambangan (%)	15
			Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) (%)	14,5
			Pertumbuhan Sektor Perikanan (%)	13,5
			Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	11
			Pertumbuhan Sektor Industri (%)	10
		2 Meningkatkan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	77,155
		3 Meningkatkan peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal;	Persentase Wirausaha Baru (%)	18,67
		4 Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja;	Laju Pertumbuhan Investasi (% / Tahun)	13,43
		5 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.	Penguatan Cadangan Pangan Provinsi (Ton)	200
			Indeks Tanam (Padi)	204
Misi Ketiga, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI	Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing	1 Tuntasnya program pemberantasan buta aksara;	Angka Melek Huruf (%)	96,68
		2 Meningkatkan akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan penancangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,29
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,48
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	75,80
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	51,37
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	118,70
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	99,54

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C(%)	73,87
			Angka Partisipasi Sekolah (%) Pendidikan Dasar	82,18
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah (%)	51,20
		3 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin	Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,90
			Angka Kematian Bayi (1 / 1000 KH)	26,98
			Angka Kematian Ibu (1 / 100.000 KH)	115
		4 Meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;	Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat (%)	45
		5 Meningkatkan kesetaraan gender;	Indeks Pembangunan Gender (%)	67,09
			Indeks Pemberdayaan Gender (%)	68,45
		6 Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.	Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan(%)	75
			Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga (%)	23
Misi Keempat, Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang	Untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintegrasi	1 Meningkatkan pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat;	Cakupan Pelayanan PMKS (%)	7,25
		2 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama;	Jumlah Konflik Bernuansa SARA	0
		3 Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;	Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah (%)	75
		4 Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk;	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,92

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015
	membangun Banten;	5 Terwujudnya peningkatan partisipasi perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah.	Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah	4
Misi Kelima, Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik	1 Meningkatkan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;	Cakupan Tindak Lanjut LHP (%)	75,47
		2 Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;	Rasio Kemandirian Daerah (%)	77,3
		3 Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi; Meningkatkan pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;	Opini Audit BPK	WTP
			Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4)	3,25
		4 Meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;	Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7)	6,5
		5 Meningkatkan pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;	Cakupan Penyelesaian Perda (%)	95

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015
		6 Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana;	Cakupan Penegakan Perda (%)	95
		7 Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, linmas, regulasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana; Meningkatnya perencanaan dan pengendalian pembangunan;	Angka Kriminalitas	2.026
			Cakupan Mitigasi Kebencanaan	75
			Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)	70
		8 Meningkatnya kualitas Demokrasi di daerah	Tingkat Partisipasi Pemilih (%)	-
			Indeks Demokrasi Indonesia	73,98

Sumber : diolah dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tema RKP 2015 yaitu **“Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”**. Unsur-unsur yang terkandung dalam tema tersebut antara lain:

1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun terakhir RPJMN Kedua yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN Ketiga.

2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan Tahun 2015 baik yang bersumber pada eksternal maupun internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu.
3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Selanjutnya dengan memperhatikan tema RKP 2015 di atas dan guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka ditetapkanlah Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 yaitu **“Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan”**.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 antara lain:

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan;
 - 1) Peningkatan Akses Pembiayaan ekonomi mikro kecil (Jamkrida, Bank Banten, KKMB)
 - 2) Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas pelaku Ekonomi mikro kecil
 - 3) Peningkatan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan
 - 4) Peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas
 - 5) Penguatan pasar domestik
 - 6) Orientasi investasi dan peningkatan produk Komoditas Substitusi Impor dan produk ekspor.
2. Kesejahteraan Rakyat Banten Yang Berkeadilan;
 - 1) Perlindungan sosial masyarakat miskin.
 - 2) Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja
 - 3) Peningkatan derajat kesehatan dan Pelayanan kesehatan untuk semua.
 - 4) Mitigasi bencana dan Penanganan pasca bencana.
 - 5) Pemerataan hasil Pembangunan

Prioritas pembangunan RKPD Tahun 2015 pada dasarnya adalah gambaran pelaksanaan prioritas pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD pada tahun rencana guna menjawab isu strategis yang ada. Adapun prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan;
2. Pemantapan kualitas SDM;
3. Pemantapan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian;
4. Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, SDA dan LH;
6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih;
7. Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Sedangkan isu strategis RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah :

1. Pengangguran dan penyediaan lapangan kerja
2. Kemiskinan
3. Ketahanan pangan
4. Investasi dan daya saing produk
5. Infrastruktur wilayah dan kawasan
6. Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja
7. Akses dan mutu pelayanan kesehatan
8. Kelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana
9. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Dengan memperhatikan tema RKPD Tahun 2015, prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan isu strategis tahun 2015 maka selanjutnya ditetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
2. Pengurangan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;
3. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan;

4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas;
5. Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan;
6. Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja;
7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan;
8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana;
9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Ke 9 (sembilan) prioritas pembangunan tersebut kemudian di implementasikan secara nyata melalui program prioritas dan target yang ada di dalam RPJMD. Keterhubungan antara prioritas pembangunan daerah tahun 2015 dengan program prioritas RPJMD Tahun 2012-2017 dijelaskan sebagaimana **Tabel 4.2** berikut:

Tabel 4.2
Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Tahun 2015 dengan
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Pengurangan Tingkat Pengangguran Melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan;			
		Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja			
			Tingkat Hubungan Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)	4,29%	Disnakertrans
		Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha			
			Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap tahunnya (%)	11,06%	Disnakertrans
		Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja			
			Cakupan kegiatan peningkatan keterampilan dan kesempatan tenaga kerja (orang)	52.800	Disnakertrans

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
2	Penurunan Tingkat Kemiskinan Melalui Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	Sosial;			
		Pemberdayaan Masyarakat Miskin			
			Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan social (kk)	1330	Dinsos
			Jumlah komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan (kk)	250	Dinsos
			Rasio pembinaan kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan jenis PNPM lainnya) (%)	45%	BPPMD
		Rehabilitasi Sosial			
			Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi (orang)	905	Dinsos
			Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi (orang)	1156	Dinsos
			Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi (orang)	530	Dinsos
			Jumlah lembaga sosial anak yang dibina (lembaga)	20	Dinsos
			Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi (orang)	680	Dinsos
			Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (orang)	307	Dinsos
			Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S) (orang)	450	Dinsos
		Perlindungan dan Jaminan Sosial			
			Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (orang)	50	Dinsos
			Jumlah bantuan untuk korban bencana (orang)	4500	Dinsos
			Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih (orang)	1,286	Dinsos
			Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (orang)	366	Dinsos
		Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina (orang)	604	Dinsos
			Jumlah Kelembagaan sosial yang dibina (lembaga)	550	Dinsos
			Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3) (orang)	400	Dinsos
			Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan (orang)	200	Dinsos
			Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan (kegiatan)	12	Biro Kesra
			Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok/badan/lembaga /organisasi keagamaan yang terfasilitasi (lembaga)	600	Biro Kesra
3	Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan Serta Penguatan Logistik Pangan	Ketahanan pangan;			
		Ketahanan Pangan Masyarakat			
			Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (ton)	200	BKPP
			Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat (ton)	712.016 1	BKPP
			Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi (lembaga)	0	BKPP
			Jumlah lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga)	72	BKPP
			Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin (%)	100	BKPP
			Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (skors PPH)	93	BKPP
			Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (kecamatan)	10	BKPP
			Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi	60	BKPP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Pertanian;			
		Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan			
			Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton)	2,237,344	Distanak
			Surplus Beras (ton)	56,855	Distanak
			Penyediaan Benih Sumber Padi (ha)	30,000	Distanak
			Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha)	80,000	Distanak
			Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton)	29,342	Distanak
			Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton)	32,669,754	Distanak
			Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha)	500	Hutbun
			Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (unit)	3	Hutbun
			Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (unit)	1	Hutbun
			cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan (unit)	3	Hutbun
			Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang)	107,000	Hutbun
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	68,025	DKP
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	> 100	DKP
			Jumlah Produksi Benih Ikan (milyar ekor)	1.50	DKP
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	170,000	DKP
		Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan			
			Nilai Tukar Petani (NTP)	105	Distanak
			Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (unit)	4	Distanak

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (unit)	9	Distanak
			Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (unit)	6	Hutbun
			Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (unit)	250	Hutbun
			Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	0.77	DKP
			Jumlah Ekspor Perikanan (ton)	3250	DKP
			Tingkat Kosumsi Ikan (kg/kapita)	28	DKP
		Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan			
			Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian (unit)	5	Distanak
			Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (unit)	26	Distanak
			Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit)	2	Hutbun
			Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (unit)	20	BKPP
		Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian			
			Cakupan ketersediaan Taktor (unit)	31	Distanak
			Cakupan ketersediaan <i>Rice Milling Unit (RMU)</i> (unit)	2	Distanak
			Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (ha)	3500	Distanak
		Kelautan dan perikanan;			
		Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil			
			Luas Areal Konservasi Laut (ha)	1	DKP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (kasus)	12	DKP
		Kehutanan;			
		Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan			
			Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (unit)	6	Hutbun
			Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)	10	Hutbun
4	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Daya Saing Investasi dan Daya Saing Produk/ Komoditas	Penanaman modal;			
		Peningkatan Iklim Investasi			
			Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)	25	BKPMPT
		Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
			Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)	9.38 Trilyun	BKPMPT
			Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)	4.05 Trilyun	BKPMPT
		Koperasi dan usaha kecil dan menengah;			
		Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM			
			Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%)	16.28%	K-UMKM
			Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)	16.28%	K-UMKM
		Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM			
			Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%)	27.00%	K-UMKM

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)	27.00%	K-UMKM
		Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM			
			Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%)	18.66%	K-UMKM
			Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%)	18.66%	K-UMKM
		Pariwisata;			
		Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata			
			Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata(%)	20%	Disbudpar
			Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata(%)	23.08%	Disbudpar
			Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata	20%	Disbudpar
			Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri(%)	19.84%	Disbudpar
		Pengembangan Kemitraan Kepariwisata			
			Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah (%)	20%	Disbudpar
			Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan dan pariwisata (%)	19.67%	Disbudpar
			Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)	19.53%	Disbudpar
		Industri;			
		Peningkatan Daya Saing Industri			
			Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%)	20	Disperindag
			Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)	20	Disperindag

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%)	20	Disperindag
			Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)	20	Disperindag
		Perdagangan;			
		Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan			
			Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%)	20	Disperindag
			Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)	20	Disperindag
5	Pembangunan Infrastruktur Guna Pemantapan Konektivitas dan Peningkatan Daya Dukung Pusat-Pusat Pertumbuhan	Pekerjaan umum;			
		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			
			Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	89	BMTR
			Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)	92	BMTR
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air			
			Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%)	10.05%	SDAP
			Luas layanan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis (ha)	2534.82	SDAP
		Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman			
			Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m3)	1.826,25 m3	SDAP
			Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman desa/kel (lokasi)	112	SDAP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Penyelesaian Gedung KP3B	1	SDAP
			Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3	SDAP
		Perhubungan;			
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian			
			Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017 (%)	40.22	Dishubkominfo
			Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sebesar 100% tahun 2017 (%)	54.06	Dishubkominfo
		Perumahan;			
		Pembinaan dan Penataan Perumahan			
			Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)	20	SDAP
		Penataan ruang;			
		Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan			
			Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)	3	Bappeda
			Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)	3.83	BMTR
			Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)	1	BMTR
		Energi dan Sumber Daya Mineral;			
		Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi			
			Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (SS)	25,000	Distamben
			Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (unit)	314	Distamben

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)	100	Distamben
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi			
			Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dok)	9	Distamben
			Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (unit)	4	Distamben
		Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi			
			Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin)	10	Distamben
			Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (dok)	1	Distamben
			Cakupan layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (unit)	4	Distamben
6	Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Pendidikan Berbasis Pasar Kerja	Kepemudaan dan olah raga;			
		Kepemudaan dan Kepramukaan			
			Jumlah organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (kwartir)	9	Dispora
			Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kelompok)	16	Dispora

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga			
			Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (%)	19 cabor/ 19 event	Dispora
			Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga (unit)	1	Dispora
		Pendidikan;			
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	47	Dindik
		Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun			
			APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A (%)	99.48	Dindik
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho (%)	99.54	Dindik
		Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C (%)	63.52	Dindik
		Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
			Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi minimum S.1 / D.IV terhadap jumlah guru keseluruhan	2.383	Dindik
		Pendidikan Tinggi			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PT/PTA (%)	7.03	Dindik
			Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit)	5	Dindik
		Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)			
			Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)	12,500	Dindik

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan			
			Rata -rata Lama Sekolah (tahun)	9.29	Dindik
			Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)	10	Dindik
		Perpustakaan.			
		Pengembangan Minat dan Budaya Baca			
			Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%)	320 (64%)	BPAD
			Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)	80 (64%)	BPAD
		Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan			
			Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)	26 (62%)	BPAD
7	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Kesehatan;			
		Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak			
			Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)	78	Dinkes
			Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%)	91	Dinkes
			Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) (%)	91.5	Dinkes
		Pembinaan Upaya Kesehatan			
			Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)	72	Dinkes
			Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%)	92	Dinkes
			Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)	100	Dinkes
			Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi dan Labkesda Provinsi Banten (%)	90	Dinkes
			Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONEK (%)	100	Dinkes

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana barang medis RSUD Banten (%)	70	RSUD Banten
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana barang non medis RSUD Banten (%)	70	RSUD Banten
			Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)	80	RSUD Banten
			Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi disemua bagian (%)	80	RSUD Banten
			Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%)	100	
			Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)	50	RSUD Banten
		Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan			
			Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap / UCI (Universal Child Immunization) dibawah 1 tahun di desa/kelurahan (%)	100	Dinkes
			Prevalensi HIV (%)	<0,5	Dinkes
			Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)	91	Dinkes
			Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	≤1	Dinkes
			Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)	40	Dinkes
			Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)	77	Dinkes
		Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan			
			Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%)	100	Dinkes
			Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)	60	Dinkes

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan			
			Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (unit)	100	Dinkes
			Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (%)	153	Dinkes
			Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (unit)	50	Dinkes
			Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)	80	Dinkes
			Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)	100	Dinkes
			Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)	32	RSUD Malingping
		Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat			
			Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%)	200	Dinkes
			Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)	60	Dinkes
			Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)	100	RSUD Malingping
			Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)	200	RSUD Malingping
			Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)	80	RSUD Banten
			Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)	70	RSUD Banten
8	Pelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi, dan Adaptasi Bencana	Lingkungan hidup;			
		Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)	20	BLHD
			Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)	20	BLHD
		Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup			
			Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	8,000	Hutbun
			Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)	20	BLHD
		Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;			
		Penanggulang-an Bencana			
			Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%)	100	BPBD
			Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	BPBD
			Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana(%)	100	BPBD
9	Pemantapan Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kependudukan dan catatan sipil;			
		Penataan Administrasi Kependudukan			
			Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)	100	Biro Pemerintahan
		Kebudayaan;			
		Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%)	20	Disbudpar
			Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat (%)	20	Disbudpar
			Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal (%)	17.65	Disbudpar
			Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%)	20.37	Disbudpar
		Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;			
		Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
			Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL) (Kab/Kota)	2 Kab/Kota	BPPMD
			Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%)	100	BPPMD
			Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya (%)	20	BPPMD
			Rasio Pembinaan TKP3		BPPMD
			Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%)	100	BPPMD
			Rasio Pembinaan Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya)	100	BPPMD
			Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS,GSI, APE) (%)	100	BPPMD
			Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)	100	BPPMD
		Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;			
		Kependudukan dan Keluarga Berencana			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan KB (orang)	80	BPPMD
		Pemberdayaan masyarakat dan desa;			
		Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan			
			Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan (%)	80	BPPMD
			Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%)	12	BPPMD
			Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (posyantek)		BPPMD
			Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa (BUMDes) (%)	85	BPPMD
			Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%)	5	BPPMD
			Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM) (%)	6.38	BPPMD
			Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)(desa/kelurahan)	6	BPPMD
			Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa (desa)	1261	BPPMD
		Perencanaan pembangunan;			
		Kerjasama Pembangunan Daerah			
			Perencanaan kerjasama pembangunan daerah (dokumen)	3	Bappeda
			Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri (%)	100	Biro Pemerintahan
		Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (%)	100	Bappeda
		Pengendalian Pembangunan Daerah			
			Cakupan hasil pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan (%)	100	Bappeda
			Rasio kegiatan pelaporan pengendalian pelaksanaan APBD (%)	100	Biro Ekbang
		Komunikasi dan informatika;			
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika			
			Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sebesar 100% tahun 2017 (%)	85.26	Dishub kominfo
			Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)	40	Set KPID
			Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)	40	Set KPID
			Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)	100	Set KPID
		Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;			
		Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat			
			Rasio Pengamanan, Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah (%)	100	Pol PP
			Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	Pol PP
			Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan (%)	100	Pol PP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Rasio Pendataan dan Tindaklanjuti Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan (%)	100	Pol PP
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
			Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah (%)	100	Set DPRD
			Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD (%)	100	Set DPRD
			Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD (%)	100	Set DPRD
			Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD	100	Set DPRD
			Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (%)	100	Set DPRD
			Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD (%)	100	Set DPRD
		Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum			
			Rasio Fasilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%)	100	Biro Pemerintahan
			Rasio Fasilitas Administrasi Pertanahan (%)	100	Biro Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (dokumen)	2	Biro Ekbang
			Rasio Kegiatan Fasilitas LPSE Provinsi Banten (%)	100	Biro Ekbang

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah (%)	4.5	Biro Ekbang
			Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah (unit)	9	Biro Ekbang
			Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah (dokumen)	10	Biro Ekbang
			Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi (%)	100	Biro Humas
			Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi	100	Biro Humas
			Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi (%)	100	Kantor Penghubung
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat (dokumen)	16	Biro Kesra
		Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah			
			Rasio Fasilitasi Pengelolaan Perlengkapan dan Aset Daerah (%)	100	Biro Aset dan Perlengkapan
			Jumlah Kekayaan Daerah (Rp)	6.310 T	Biro Aset dan Perlengkapan
		Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
			Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)	3.838 T	DPPKD
			Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/inf ormasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (unit)	2	DPPKD
			Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)	3	DPPKD
			Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	100	DPPKD
			Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)	100	DPPKD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah			
			Rasio ketersediaan dokumen penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah (%)	100	Biro Organisasi
		Pembinaan Karier dan Administasi Kepegawaian Aparatur			
			Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten (%)	100	BKD
			Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian (%)	100	BKD
			Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur (%)	100	BKD
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			
			Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur (%)	100	Badan Diklat
			Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (%)	100	Badan Diklat
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			
			Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%)	100	Seluruh SKPD
			Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%)	100	Seluruh SKPD
		Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur			
			Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (%)	100	Seluruh SKPD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (%)	100	Seluruh SKPD
			Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (%)	100	Seluruh SKPD
			Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (%)	100	Seluruh SKPD
		Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur			
			Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur (%)	100	Inspektorat
		Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM			
			Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%)	20	Biro Hukum
			Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM (%)	100	Biro Hukum
		Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK			
			Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (dokumen)	34	Balitbangda
		Statistik;			
		Penyediaan Data Pembangunan Daerah			
			Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (paket)	41	Seluruh SKPD
		Kearsipan			
		Pembinaan Kearsipan Daerah			
			Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%)	32 (74%)	BPAD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2015	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)	32 (74%)	BPAD
		Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;			
		Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik			
			Cakupan pembinaan lembaga yang sadar politik (%)	363	Badan Kesbangpol
			Cakupan pembinaan lembaga yang sadar kerukunan (%)	426	Badan Kesbangpol
			Cakupan kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah (%)	100	Badan Kesbangpol
		Ketransmig-rasian			
		Penyiapan, pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi			
			Cakupan Penyiapan, Pelayan-an, Pembinaan, dan Kebutuhan Masyarakat Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat (KK)	350	Disnakertrans
			Cakupan Fasilitas Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi (KK)	185	Disnakertrans